# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data Hasil Realisasi Keuangan Negara Tahunan sebanyak 30 tahun selama periode tahun 1980-2009. Alasan memilih tahun 1980-2009 karena data yang saya temukan yaitu dari tahun 1980-2009 sudah dalam bentuk tabel dan ada juga peningkatan tiap tahunnya selama 30 tahun. Adapun femomena yang terjadi yaitu dalam kurun waktu 1984-1988 penerimaan pajak memperlihatkan peningkatan yang cenderung stabil dari tahun ke tahunnya (Nota Keuangan dan RAPBN, 1988).

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN (1988) dikemukakan bahwa rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang masih relatif rendah. Masih menurut Nota Keuangan RAPBN (1988) mengatakan bahwa masa krisis yang telah berlangsung selama tahun 1998, penerimaan pajak tidak terlalu menggembirakan. Hal itu berkaitan dengan melambatnya pertumbuhan sektor swasta dan dunia usaha, yang pada gilirannya berpengaruh pada menurunnya kontribusi sektor tersebut pada penerimaan perpajakan (Nota Keuangan dan RAPBN, 1988). Namun di lain pihak kemerosotan bidang ekonomi, telah memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi hampir semua jenis pajak pada tahun 1998-2000 (Nota Keuangan dan RAPBN, 1988).

Kemudian kontribusi tertinggi dari pengeluaran pemerintah terjadi pada tahun 1980-1982 dengan nilai 13% dari total PDB (Nota Keuangan dan RAPBN,

1987). Untuk tahun-tahun selanjutnya kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDB hanya berkisar sekitar 7-11% (Nota Keuangan dan RAPBN, 1987).

Lalu menurut Rogatianus Maryatmo (2005:80) fenomena pertumbuhan ekonomi tahun 1983 merupakan periode pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Masih menurut Rogatianus Maryatmo (2005:80) bahwa pada tahun 1983 dan 1984, pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Meskipun demikian, pada masa ini telah tampak peranan sektor nonmigas (Rogatianus Maryatmo, 2005:80). Hal ini terjadi karena bulan Mei 1983 dilakukan devaluasi yang diharapkan dapat meningkatlkan daya saing perekonomian dan akhirnya dapat mendorong ekspor nonmigas (Rogatianus Maryatmo, 2005:80). Kemudian Rogatianus Maryatmo (2005:80) mengatakan bahwa pada tahun 1989-1995, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat, baik karena efek perdagangan dimana terjadi kenaikan ekspor nonmigas maupun kenaikan permintaan domestik akibat kondisi investasi dan produksi yang membaik.

Sebelum membahas pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak, terlebih dahulu akan dibahas perkembangan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan pajak selama periode 1980-2009. Data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini berupa data sekunder, karena merupakan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik yang telah diolah dalam bentuk Laporan Keuangan Negara Tahunan.

### 4.1.1 Deskriptif Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia

Menurut WW. Rostow dan RA. Musgrave, perkembangan pengeluaran pemerintah sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Hal itu juga dialami oleh Indonesia dimana baik nilai nominal maupun riil dari total pengeluaran pemerintah terus meningkat sepanjang tahun (Agustinus Endah, 2010:109). Dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah dilihat dari besarnya pembelanjaan pemerintah untuk barang dan jasa, yaitu pengeluaran pemerintah riil berdasarkan harga konstan tahun 2000. Adapun perkembangan pengeluaran pemerintah dalam 30 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**
**Data Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 1980-2009**
**(Berdasarkan Harga Konstan 2000)**

| Tahun | Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah) | Growth (%) |
|---|---|---|
| 1980 | 61600.57 | - |
| 1981 | 67830.38 | 10.11 |
| 1982 | 73484.8 | 8.34 |
| 1983 | 71792.74 | -2.30 |
| 1984 | 74879.73 | 4.30 |
| 1985 | 80584.24 | 7.62 |
| 1986 | 82789 | 2.74 |
| 1987 | 77977.67 | -5.81 |
| 1988 | 83691.05 | 7.33 |
| 1989 | 92369.75 | 10.37 |
| 1990 | 95438.14 | 3.32 |
| 1991 | 102182.27 | 7.07 |
| 1992 | 108170.49 | 5.86 |
| 1993 | 105655.96 | -2.32 |
| 1994 | 106208.42 | 0.52 |
| 1995 | 109820.77 | 3.40 |
| 1996 | 110364.73 | 0.49 |
| 1997 | 110598.04 | 0.29 |
| 1998 | 93597.42 | -15.37 |
| 1999 | 95100.68 | 1.60 |
| 2000 | 100538.09 | 5.71 |
| 2001 | 109887.58 | 9.29 |
| 2002 | 110400.15 | 0.46 |
| 2003 | 121404.1 | 9.96 |
| 2004 | 126248.7 | 3.99 |
| 2005 | 136424.9 | 8.06 |
| 2006 | 147563.7 | 8.16 |
| 2007 | 153309.6 | 3.89 |
| 2008 | 169297.2 | 10.43 |
| 2009 | 195907.7 | 15.71 |

Sumber: Statistik Indonesia, BPS (Data Diolah)

Tabel 4.1 memperlihatkan perkembangan pengeluaran pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Pengeluaran pemerintah ini mencakup konsumsi pemerintah untuk barang dan jasa (Badan Pusat Statistik). Apabila dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDB Indonesia, pengeluaran pemerintah hanya berkontribusi sekitar 10% (Badan Pusat Statistik). Kontribusi tertinggi dari pengeluaran pemerintah terjadi pada tahun 1980-1982 dengan nilai 13% dari total PDB (Badan Pusat Statistik). Untuk tahun-tahun selanjutnya kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDB hanya berkisar sekitar 7-11% (Badan Pusat Statistik).

Cara menghitung tingkat pengeluaran pemerintah riil yaitu:

$$\text{Tingkat Pengeluaran Pemerintah Riil} = \frac{\text{Pengeluaran Pemerintah riil} - \text{Pengeluaran Pemerintah riil}_0 \times 100\%}{\text{Pengeluaran Pemerintah riil}_0}$$

Sumber: Sadono Sukirno (2011:50)

Dimana:
Pengeluaran Pemerintah Riil = tahun dimana Pengeluaran Pemerintah dihitung
Pengeluaran Pemerintah $\text{Riil}_0$ = Pengeluaran Pemerintah pada tahun sebelumnya

Pertumbuhan pengeluaran pemerintah Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, terlihat dari tabel 4.1 penurunan yang cenderung tajam yaitu hanya pada tahun 1999 (Badan Pusat Statistik). Tahun 1999 terjadi penurunan 15,3% (Badan Pusat Statistik). Penurunan ini tidak disertai dengan penurunan kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan PDB riil (Badan Pusat Statistik). Penurunan ini terjadi karena dampak dari krisis yang berlangsung pada tahun sebelumnya, sehingga pemerintah harus mengurangi pengurangannya, khususnya belanja pegawai (Badan Pusat Statistik). Peningkatan untuk pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 1986 adalah lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatannya dalam tahun 1985 (Badan Pusat Statistik).

Meningkatnya pengeluaran pemerintah ini berkaitan erat dengan naiknya pengeluaran untuk belanja pegawai (Nota Keuangan dan RAPBN, 1987).

### 4.1.2 Deskriptif Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Menurut Keynes, pendapatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi konsumsi baik perorangan maupun secara agregat. Dalam penelitian ini variabel pendapatan diproksikan melalui GDP Riil atas dasar harga konstan tahun 2000. Adapun data pendapatan nasional Indonesia beserta perkembangannya selama 30 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2**
**Data GDP Riil Indonesia Tahun 1980-2009**
**(Berdasarkan harga konstan 2000)**

| Tahun | GDP Riil (Miliar Rupiah) | Growth (%) |
|---|---|---|
| 1980 | 577649.81 | - |
| 1981 | 623441.01 | 7.92 |
| 1982 | 637446.27 | 2.24 |
| 1983 | 655039.79 | 2.76 |
| 1984 | 700249.64 | 6.90 |
| 1985 | 717490.79 | 2.46 |
| 1986 | 759643.7 | 5.87 |
| 1987 | 797063.2 | 4.92 |
| 1988 | 843137.42 | 5.78 |
| 1989 | 906005.85 | 7.45 |
| 1990 | 971620.9 | 7.24 |
| 1991 | 1039151.06 | 6.95 |
| 1992 | 1106273.91 | 6.45 |
| 1993 | 1150524.86 | 3.99 |
| 1994 | 1237274.11 | 7.53 |
| 1995 | 1338978.13 | 8.22 |
| 1996 | 1443661.95 | 7.81 |
| 1997 | 1511512.31 | 4.69 |
| 1998 | 1313100.24 | -13.12 |
| 1999 | 1336188.44 | 1.75 |
| 2000 | 1389769.6 | 4.01 |
| 2001 | 1442984.6 | 3.82 |
| 2002 | 1506124.4 | 4.37 |
| 2003 | 1577171.3 | 4.71 |
| 2004 | 1656525.7 | 5.03 |
| 2005 | 1749546.9 | 5.61 |
| 2006 | 1847126.7 | 5.58 |
| 2007 | 1963091.8 | 6.28 |
| 2008 | 2082103.7 | 6.06 |
| 2009 | 2176975.5 | 4.55 |

Sumber : Statistik Indonesia, BPS (Data Diolah)

Data tabel 4.2 diketahui bahwa pertumbuhan GDP riil di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 1998 GDP riil Indonesia sempat mengalami penurunan yang sangat tajam hingga pertumbuhannya negatif yaitu sebesar 13,12% (Badan Pusat Statistik). Hal ini disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun tersebut sehingga stabilitas perekonomian Indonesia pun turut terganggu (Badan Pusat Statistik).

Cara menghitung tingkat Produk Domestik Bruto Riil yaitu:

$$\text{Tingkat PDB Riil} = \frac{\text{PDB riil} - \text{PDB riil}_0 \times 100\%}{\text{PDB riil}_0}$$

Sumber: Sadono Sukirno (2011:51)

Dimana:
PDB Riil: tahun dimana PDB Riil dihitung
$\text{PDB Riil}_0$: PDB Riil pada tahun sebelumnya

Menurut Rogatianus Maryatmo (2005:80) periode waktu setelah tahun 1983 merupakan periode pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Masih menurut Rogatianus Maryatmo (2005:80) bahwa pada tahun 1983 dan 1984, pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Meskipun demikian, Rogatianus Maryatmo (2005:80) mengatakan bahwa pada masa ini telah tampak peranan sektor nonmigas. Lalu Rogatianus Maryatmo (2005:80) mengatakan bahwa hal ini terjadi karena bulan Mei 1983 dilakukan devaluasi yang diharapkan dapat meningkatlkan daya saing perekonomian dan akhirnya dapat mendorong ekspor nonmigas. Kemudian Rogatianus Maryatmo (2005:80) mengatakan bahwa pada tahun 1989-1995, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat, baik karena efek perdagangan dimana terjadi kenaikan ekspor nonmigas maupun kenaikan permintaan domestik akibat kondisi investasi dan produksi yang membaik.

Pada tahun 1996 PDB riil masih tumbuh dengan tingkat 7,98 persen (Nota Keuangan dan RAPBN 1999/2000). Namun sejak pertengahan tahun 1997 pertumbuhan PDB riil mulai mengalami perlambatan dan untuk seluruh tahun PDB riil hanya tumbuh dengan tingkat 4,65 persen (Nota Keuangan dan RAPBN 1999/2000). Pertumbuhan PDB riil menurun tajam dalam tahun 1998 menjadi sekitar minus 13,06 persen (Gambar 4.2). Perlambatan pertumbuhan PDB riil dalam tahun 1997 terutama disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan dan krisis nilai tukar rupiah yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, sedangkan kinerja ekonomi yang memburuk dalam tahun 1998 terutama disebabkan oleh dampak krisis nilai tukar rupiah yang telah mengganggu hampir semua sendi-sendi perekonomian nasional (Nota Keuangan dan RAPBN 1999/2000). Tahun 1998 semua lapangan usaha diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif, kecuali lapangan usaha pertanian yang masih dapat tumbuh positif dengan tingkat cukup lemah (Nota Keuangan dan RAPBN 1999/2000).

Tahun 1999 besarnya GDP riil Indonesia terus meningkat (Nota Keuangan RI, 2010). Ini mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia sedikit demi sedikit mulai menunjukkan pertumbuhan yang semakin membaik pasca krisis yang melanda tahun 1998 (Nota Keuangan RI, 2010). Rata-rata pertumbuhannya berkisar antara 4% hingga 6% dan relatif stabil pada angka tersebut hingga di penghujung tahun 2009 (Nota Keuangan RI, 2010). Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan PDB di Indonesia cukup stabil, untuk tahun 2006-2009 saja pertumbuhan PDB berkisar 4% hingga 6% per tahun (Nota Keuangan RI, 2010). Stabilnya pertumbuhan PDB ini berdampak pada kenaikan pendapatan nasional

yang stabil pula (Nota Keuangan RI, 2010). Kenaikan pendapatan nasional akan mempengaruhi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk mengkonsumsi, sehingga besarnya pendapatan nasional akan mempengaruhi besarnya konsumsi masyarakat suatu negara (Nota Keuangan RI, 2010).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif (Badan Pusat Statistik). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pernah dialami pada tahun 1970-an dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 7,5% yaitu antara tahun 1973-1981 (Badan Pusat Statistik). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu terjadi setiap tahun, pada tahun 1982 terjadi krisis minyak dan resesi ekonomi dunia yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun hingga mencapai 2,3% (Badan Pusat Statistik). Antara tahun 1981-1986 rata-rata pertumbuhan ekonomi turun hingga mencapai 4,46% (Badan Pusat Statistik). Penyesuaian ekonomi dilakukan pemerintah dengan cara membangun sektor keuangan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari resesi ekonomi (Badan Pusat Statistik).

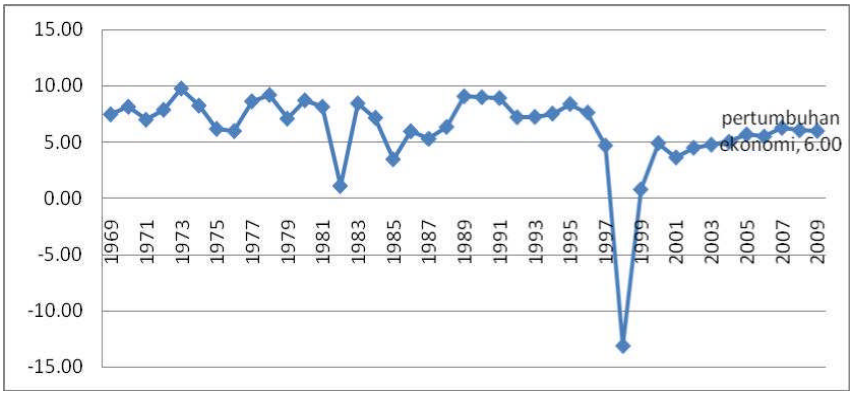
Setelah tahun 1988 pemerintah berhasil membuktikan kebijakan ekonominya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 7,46% dan terus berlanjut hingga tahun 1995 sebesar 8,22% (Badan Pusat Statistik). Kinerja perekonomian mengalami penurunan ketika krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada bulan Juli tahun 1997 (Badan Pusat Statistik).

Kondisi perekonomian nasional pada tahun 1997 menghadapi permasalahan yang kurang menguntungkan berupa krisis moneter, yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi (Badan Pusat Statistik). Dengan adanya

krisis ekonomi tersebut, perekonomian semakin memburuk ditandai dengan tahun 1998 pertumbuhan ekonomi mengalami keterpurukan hingga turun sangat tajam mencapai -18,26% selain itu gejolak kurs dan meningkatnya angka kemiskinan, yang selanjutnya mengkibatkan semakin beratnya kehidupan masyarakat secara luas (Badan Pusat Statistik). Apabila kondisi tersebut tidak ditangani secara terpadu lintas sektoral, dalam jangka pendek akan menyulitkan upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi (Badan Pusat Statistik).

Dalam periode april 1998 sampai dengan oktober 1999 (masa setelah krisis), kebijakan fiskal memainkan peranan yang sangat besar dalam upaya-upaya penyehatan perbankan (Badan Pusat Statistik). Langkah utama yang dilaksanakan adalah penutupan bank-bank yang tidak sehat (Badan Pusat Statistik). Langkah ini bila dibaca dalam kondisi normal merupakan langkah yang tidak lazim dilakukan oleh otoritas fiskal (Badan Pusat Statistik). Selain itu, pemerintah membatalkan dan menunda berbagai mega proyek pemerintah guna memperketat pengeluaran melalui APBN serta mengurangi laju impor barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras (Badan Pusat Statistik).

Sejak tahun 1999 perekonomian Indonesia mengalami peningkatan tiap tahun, setelah masa krisis perekonomian Indonesia perlahan pulih hingga tahun 2006 (Badan Pusat Statistik). Pada tahun 1999 ekonomi tumbuh sekitar 0,79%, tahun 2000 sekitar 4,92% tahun 2001 sekitar 3,64% dan 2002 sekitar 4,50% (Badan Pusat Statistik). Tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,78%, disusul 5,03% pada tahun 2004, 5,69% pada tahun 2005 dan 5,5% pada tahun 2006 (Badan Pusat Statistik).




**Gambar 4.1**
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1969-2009**
**Sumber: Statistik Indonesia, BPS**

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung berfluktuatif (Badan Pusat Statistik). Dari tahun 1980an hingga tahun 1990an, pertumbuhan ekonomi sangat tidak stabil (Badan Pusat Statistik). Mulai tahun 1990an pertumbuhan ekonomi cenderung stabil, namun krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sangat tajam hingga ke level negatif (Badan Pusat Statistik). Pada sekitar tahun 2000an perekonomian Indonesia mulai mengalami masa pemulihan, hingga sekarang berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap stabil (Badan Pusat Statistik). Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi diasumsikan mencapai 5,8% tingkat inflasi 5,3% dan PDB diperkirakan mencapai 6.253,8 triliyun rupiah (Badan Pusat Statistik).

### 4.1.3 Deskriptif Perkembangan Penerimaan Pajak di Indonesia

Pajak merupakan sumber penerimaan utama suatu negara yang bersumber baik dari dalam maupun luar negeri dan paling diandalkan oleh pemerintah.

Adapun perkembangan pengeluaran pemerintah dalam 30 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3**
**Penerimaan Pajak Pemerintah Indonesia Tahun 1980-2009**

| Tahun | Penerimaan Pajak Oleh Pemerintah (Miliar Rupiah) | Growth (%) |
|---|---|---|
| 1980 | 9911 | 0 |
| 1981 | 11876.2 | 19.82 |
| 1982 | 11982.7 | 0.89 |
| 1983 | 13913.7 | 16.11 |
| 1984 | 15218.2 | 9.37 |
| 1985 | 17761.1 | 16.70 |
| 1986 | 14993.3 | -15.58 |
| 1987 | 10756 | -28.26 |
| 1988 | 13477 | 25.29 |
| 1989 | 17488 | 29.76 |
| 1990 | 21834 | 24.85 |
| 1991 | 26546 | 21.58 |
| 1992 | 32122 | 21.00 |
| 1993 | 39772 | 23.81 |
| 1994 | 46886 | 17.88 |
| 1995 | 52989 | 13.01 |
| 1996 | 57340 | 8.21 |
| 1997 | 70935 | 23.70 |
| 1998 | 96082 | 35.45 |
| 1999 | 107123 | 11.49 |
| 2000 | 115800 | 8.10 |
| 2001 | 185500 | 60.18 |
| 2002 | 210100 | 13.26 |
| 2003 | 242000 | 15.18 |
| 2004 | 280800 | 16.03 |
| 2005 | 346800 | 23.50 |
| 2006 | 425053 | 22.56 |
| 2007 | 429011 | 0.93 |
| 2008 | 633819 | 47.73 |
| 2009 | 641380 | 1.19 |

**Sumber: -Nota Keuangan RI, Departemen Keuangan (Data Diolah)**
**-International Financial Statistic CD-room (Data Diolah)**

Tabel 4.3 memperlihatkan besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah selama 30 tahun terakhir (Nota Keuangan dan RAPBN, 1988). Dalam kurun waktu 1984-1988 penerimaan pajak memperlihatkan peningkatan yang cenderung stabil dari tahun ke tahunnya (Nota Keuangan dan RAPBN, 1988). Kenaikan penerimaan dari sektor perpajakan ini telah menyebabkan penerimaan dalam negeri semakin tangguh karena sedikit demi sedikit telah mampu melepaskan ketergantungan pada penerimaan minyak bumi dan gas alam (Nota Keuangan dan RAPBN, 1988). Namun demikian penerimaan dari sektor minyak

masih merupakan sumber dana yang penting, disamping sebagai penyumbang devisa yang besar yang diperlukan bagi pembangunan (Nota Keuangan dan RAPBN, 1988). Harga minyak yang turun drastis dalam tahun 1986/1987, berangsur-angsur telah membaik walaupun belum begitu menggembirakan (Nota Keuangan dan RAPBN, 1988).

Dalam tahun anggaran 1995/1996 kenaikan penerimaan pajak mencapai sebesar hampir 13 kali dari tahun anggaran 1982/1983. Disamping itu peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri juga mengalami peningkatan yang cukup berarti. Jika dalam tahun anggaran 1982/1983 peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri adalah sebesar 30,5 persen, maka dalam tahun anggaran 1995/1996 telah meningkat menjadi sebesar 67,7 persen.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN dikemukakan lebih lanjut bahwa terlepas dari keberhasilan tersebut di atas, penerimaan pajak masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari angka tax ratio yaitu rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang masih relatif rendah. Pada masa krisis yang telah berlangsung selama tahun 1998, penerimaan pajak tidak terlalu menggembirakan. Hal itu berkaitan dengan melambatnya pertumbuhan sektor swasta dan dunia usaha, yang pada gilirannya berpengaruh pada menurunnya kontribusi sektor tersebut pada penerimaan perpajakan. Dalam kondisi normal, penerimaan pajak berhubungan erat dengan beberapa variabel makro, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, perkembangan harga (inflasi), dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Namun di lain pihak kemerosotan bidang ekonomi, telah memberikan pengaruh

yang kurang menguntungkan bagi hampir semua jenis pajak pada tahun 1998-2000.

Cara menghitung tingkat penerimaan pajak riil yaitu:

$$\text{Tingkat Penerimaan Pajak Riil} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Riil} - \text{Penerimaan Pajak Riil}_0 \times 100\%}{\text{Penerimaan Pajak riil}_0}$$

Sumber: Sadono Sukirno (2011:52)

Dimana:
Penerimaan Pajak Riil: tahun dimana Penerimaan Pajak Riil dihitung
Penerimaan Pajak $\text{Riil}_{0:}$ Penerimaan Pajak Riil pada tahun sebelumnya

Penerimaan perpajakan selama periode 2005-2008 mengalami peningkatan secara signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,8 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh pos penerimaan, terutama pos penerimaan PPh, PPN dan PPnBM, dan cukai. Faktor utama yang berpengaruh pada meningkatnya penerimaan perpajakan adalah perbaikan sistem administrasi perpajakan sebagai hasil dari kegiatan modernisasi administrasi di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai.

Pada tahun 2009 untuk mempertahankan pendapatan negara serta mendukung paket stimulus fiskal, telah dilakukan beberapa langkah kebijakan pendukung khususnya di perpajakan. Kebijakan tersebut antara lain meliputi pertama, penyederhanaan lapisan penghasilan, penurunan tarif, dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan pemberian subsidi pajak/pajak ditanggung Pemerintah di PPN komoditi tertentu.

Selain itu, dalam tahun 2008, dan selanjutnya diperpanjang hingga Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan program sunset policy yang mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Kebijakan Sunset Policy merupakan suatu kebijakan yang memberikan fasilitas penghapusan sanksi

administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan ketentuan pelaksanaannya. Tujuan dari kebijakan ini yaitu guna mendorong wajib pajak dan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan benar (Nota Keuangan Republik Indonesia, 2010).

### 4.2 Analisis Verifikatif

Pada bagian ini akan diuji pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*).

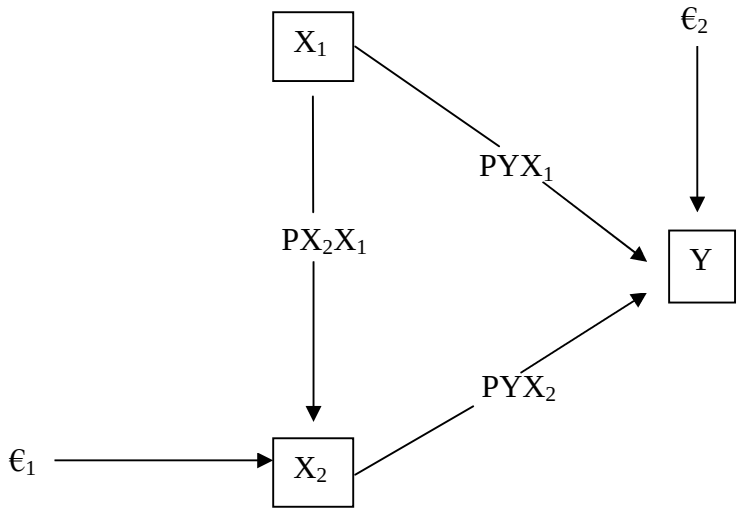
Menurut Nirwana SK Sitepu (1994:15) dalam Umi Narimawati (2010:48) adalah sebagai berikut:

> **"**Menentukan struktur hubungan antar variabel berdasarkan pada diagram pemikiran. Di dalam melakukan analisis jalur harus dijelaskan hubungan antar variabel secara diagram jalur yang bentuknya ditentukan oleh proporsi teoritik yang berasal dari kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis penelitian."

Pengujian akan dilakukan dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian pada tahap kedua akan diuji pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak.

Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Model analisis jalur adalah sebagai berikut:




**Gambar 4.2**
**Model Analisis Jalur**
**Sumber : Umi Narimawati (2010:49)**

Gambar diagram jalur seperti terlihat diatas dapat diformulasikan kedalam dua bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama

$$\mathbf{X_2 = P_{X2X1}X_1 + \varepsilon_1}$$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

$$\mathbf{Y = P_{YX1}X_1 + P_{YX2}X_2 + \varepsilon_2}$$

Keterangan:
Y = Penerimaan Pajak
$X_2$ = Pertumbuhan Ekonomi
$X_1$ = Pengeluaran Pemerintah
$PX_2X_1$ = Koefisien jalur Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
$PYX_1$ = Koefisien jalur Pengeluaran Pemerintah terhadap Penerimaan Pajak
$PYX_2$ = Koefisien jalur Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak
€ = Pengaruh faktor lain

Dari data masing-masing variabel yang terkumpul, dibuat rekap data untuk perhitungan analisis jalur sebagai berikut:

**Tabel 4.4**
**Rekapitulasi Data Untuk Perhitungan Analisis Jalur**

| N | $X_1$ | $X_2$ | Y | $X_1^2$ | $X_2^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61600.57 | 577649.81 | 9911 | 3.794.630.224 | 333.679.302.993 |
| 2 | 67830.38 | 623441.01 | 11876.2 | 4.600.960.451 | 388.678.692.950 |
| 3 | 73484.8 | 637446.27 | 11982.7 | 5.400.015.831 | 406.337.747.137 |
| 4 | 71792.74 | 655039.79 | 13913.7 | 5.154.197.517 | 429.077.126.483 |
| 5 | 74879.73 | 700249.64 | 15218.2 | 5.606.973.965 | 490.349.558.320 |
| 6 | 80584.24 | 717490.79 | 17761.1 | 6.493.819.736 | 514.793.033.735 |
| 7 | 82789 | 759643.7 | 14993.3 | 6.854.018.521 | 577.058.550.950 |
| 8 | 77977.67 | 797063.2 | 10756 | 6.080.517.019 | 635.309.744.794 |
| 9 | 83691.05 | 843137.42 | 13477 | 7.004.191.850 | 710.880.709.004 |
| 10 | 92369.75 | 906005.85 | 17488 | 8.532.170.715 | 820.846.600.234 |
| 11 | 95438.14 | 971620.9 | 21834 | 9.108.438.567 | 944.047.173.317 |
| 12 | 102182.27 | 1039151.06 | 26546 | 10.441.216.302 | 1.079.834.925.499 |
| 13 | 108170.49 | 1106273.91 | 32122 | 11.700.854.907 | 1.223.841.963.947 |
| 14 | 105655.96 | 1150524.86 | 39772 | 11.163.181.884 | 1.323.707.453.478 |
| 15 | 106208.42 | 1237274.11 | 46886 | 11.280.228.479 | 1.530.847.223.276 |
| 16 | 109820.77 | 1338978.13 | 52989 | 12.060.601.523 | 1.792.862.432.618 |
| 17 | 110364.73 | 1443661.95 | 57340 | 12.180.373.628 | 2.084.159.825.878 |
| 18 | 110598.04 | 1511512.31 | 70935 | 12.231.926.452 | 2.284.669.463.282 |
| 19 | 93597.42 | 1313100.24 | 96082 | 8.760.477.031 | 1.724.232.240.288 |
| 20 | 95100.68 | 1336188.44 | 107123 | 9.044.139.336 | 1.785.399.547.190 |
| 21 | 100538.09 | 1389769.6 | 115800 | 10.107.907.541 | 1.931.459.541.084 |
| 22 | 109887.58 | 1442984.6 | 185500 | 12.075.280.238 | 2.082.204.555.837 |
| 23 | 110400.15 | 1506124.4 | 210100 | 12.188.193.120 | 2.268.410.708.275 |
| 24 | 121404.1 | 1577171.3 | 242000 | 14.738.955.497 | 2.487.469.309.544 |
| 25 | 126248.7 | 1656525.7 | 280800 | 15.938.734.252 | 2.744.077.394.760 |
| 26 | 136424.9 | 1749546.9 | 346800 | 18.611.753.340 | 3.060.914.355.300 |
| 27 | 147563.7 | 1847126.7 | 425053 | 21.775.045.558 | 3.411.877.045.853 |
| 28 | 153309.6 | 1963091.8 | 429011 | 23.503.833.452 | 3.853.729.415.227 |
| 29 | 169297.2 | 2082103.7 | 633819 | 28.661.541.928 | 4.335.155.817.554 |
| 30 | 195907.7 | 2176975.5 | 641380 | 38.379.826.919 | 4.739.222.327.600 |
| ∑ | **3175118,57** | **37056873,59** | **4199269,2** | **363.474.005.782** | **51.995.133.786.407** |

| N | $Y^2$ | $X_1.X_2$ | $X_1.Y$ | $X_2.Y$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.227.921 | 35.583.557.556 | 610.523.249 | 5.725.087.267 |
| 2 | 141.044.126 | 42.288.240.616 | 805.567.159 | 7.404.110.123 |
| 3 | 143.585.099 | 46.842.611.662 | 880.546.313 | 7.638.327.420 |
| 4 | 193.591.048 | 47.027.101.333 | 998.902.647 | 9.114.027.126 |
| 5 | 231.593.611 | 52.434.503.976 | 1.139.534.707 | 10.656.539.071 |
| 6 | 315.456.673 | 57.818.450.019 | 1.431.264.745 | 12.743.425.670 |
| 7 | 224.799.045 | 62.890.142.279 | 1.241.280.314 | 11.389.565.887 |
| 8 | 115.691.536 | 62.153.131.179 | 838.727.819 | 8.573.211.779 |
| 9 | 181.629.529 | 70.563.055.974 | 1.127.904.281 | 11.362.963.009 |
| 10 | 305.830.144 | 83.687.533.863 | 1.615.362.188 | 15.844.230.305 |
| 11 | 476.723.556 | 92.729.691.481 | 2.083.796.349 | 21.214.370.731 |
| 12 | 704.690.116 | 106.182.814.184 | 2.712.530.539 | 27.585.304.039 |
| 13 | 1.031.822.884 | 119.666.190.919 | 3.474.652.480 | 35.535.730.537 |
| 14 | 1.581.811.984 | 121.559.808.587 | 4.202.148.841 | 45.758.674.732 |
| 15 | 2.198.296.996 | 131.408.928.330 | 4.979.687.980 | 58.010.833.921 |
| 16 | 2.807.834.121 | 147.047.609.250 | 5.819.292.782 | 70.951.112.131 |
| 17 | 3.287.875.600 | 159.329.361.323 | 6.328.313.618 | 82.779.576.213 |
| 18 | 5.031.774.225 | 167.170.298.922 | 7.845.271.967 | 107.219.125.710 |
| 19 | 9.231.750.724 | 122.902.794.665 | 8.993.027.308 | 126.165.297.260 |
| 20 | 11.475.337.129 | 127.072.429.252 | 10.187.470.144 | 143.136.514.258 |
| 21 | 13.409.640.000 | 139.724.781.124 | 11.642.310.822 | 160.935.319.680 |
| 22 | 34.410.250.000 | 158.566.085.671 | 20.384.146.090 | 267.673.643.300 |
| 23 | 44.142.010.000 | 166.276.359.679 | 23.195.071.515 | 316.436.736.440 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 58.564.000.000 | 191.475.062.222 | 29.379.792.200 | 381.675.454.600 |
| 25 | 78.848.640.000 | 209.134.216.142 | 35.450.634.960 | 465.152.416.560 |
| 26 | 120.270.240.000 | 238.681.760.878 | 47.312.155.320 | 606.742.864.920 |
| 27 | 180.670.052.809 | 272.568.850.221 | 62.722.393.376 | 785.126.745.215 |
| 28 | 184.050.438.121 | 300.960.818.621 | 65.771.504.806 | 842.187.976.210 |
| 29 | 401.726.524.761 | 352.494.326.520 | 107.303.782.007 | 1.319.676.885.030 |
| 30 | 411.368.304.400 | 426.486.263.161 | 125.651.280.626 | 1.396.268.546.190 |
| ∑ | **1.567.239.466.159** | **4.312.726.779.609** | **596.128.877.151** | **7.360.684.615.334** |

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis).* Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil komputasi analisis jalur menggunakan bantuan *software SPSS 18* dapat dilihat pada lampiran. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel independen, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel interpretasi koefisien korelasi berikut:

**Tabel 4.5**
**Tingkat Keeratan Korelasi**

| | |
|---|---|
| 0 - 0.20 | Sangat rendah (hampir tidak ada hubungan) |
| 0.21 - 0.40 | Korelasi yang lemah |
| 0.41 - 0.60 | Korelasi sedang |
| 0.61 - 0.80 | Cukup tinggi |
| 0.81 - 1.00 | Korelasi tinggi |

**Sumber: Syahri Alhusin dalam Umi Narimawati (2010:50)**

### 4.2.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berkurangnya pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fenomena yang terjadi yaitu kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan PDB Indonesia masih rendah terjadi karena pengeluaran pemerintah atas pertumbuhan ekonomi belum stabil. Kontribusi tertinggi dari pengeluaran pemerintah terjadi pada tahun 1980-1982 dengan nilai 13% dari total PDB. Untuk tahun-tahun selanjutnya kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDB hanya berkisar sekitar 7-11% yaitu masih relatif rendah. Penurunan ini

terjadi karena dampak dari krisis yang berlangsung pada tahun sebelumnya. Cara mengatasi masalah tersebut, Pemerintah harus mengurangi pengeluarannya khususnya belanja pegawai.

### 4.2.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak

Pengeluaran pemerintah yang rendah dapat meningkatkan penerimaan pajak. Fenomena yang tejadi yaitu kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak Indonesia masih tinggi terjadi karena pengeluaran pemerintah atas penerimaan pajak belum stabil. Peningkatan untuk pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2002 yaitu 0,46 persen adalah lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatannya dalam tahun 2003 yaitu 9,96 persen. Meningkatnya pengeluaran pemerintah ini disebakan oleh naiknya pengeluaran untuk belanja pegawai. Cara mengatasi agar pengeluaran pemerintah dapat stabil yaitu Pemerintah melakukan penekanan belanja, melaksanakan program-program, proyek yang ditujukan untuk kepentingan rakyat harus dijalankan dengan kesadaran dan tepat sasaran.

### 4.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan pajak. Fenomena yang terjadi yaitu pertumbuhan PDB riil di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 1998 PDB riil Indonesia sempat mengalami penurunan yang sangat tajam hingga pertumbuhannya negatif yaitu sebesar 13,12%. Hal ini disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun tersebut sehingga stabilitas perekonomian Indonesia pun turut terganggu. Pada tahun 1996 PDB riil masih tumbuh dengan

tingkat 7,81 persen. Namun sejak pertengahan tahun 1997 pertumbuhan PDB riil mulai mengalami perlambatan dan untuk seluruh tahun PDB riil hanya tumbuh dengan tingkat 4,69 persen. Perlambatan pertumbuhan PDB riil dalam tahun 1997 terutama disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan dan krisis nilai tukar rupiah yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Cara mengatasi agar pertumbuhan ekonomi dapat stabil yaitu dengan cara pemerintah membatalkan dan menunda berbagai mega proyek pemerintah guna memperketat pengeluaran melalui APBN serta mengurangi laju impor barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras, penyesuaian ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan cara membangun sektor keuangan, mengkolaborasi sumber daya manusia dan sumber daya alam, dan melakukan intervensi dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan pemerataan ekonomi.

### 4.2.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak

Dari kedua variabel diatas dapat disimpulkan bahwa berkurangnya pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak di Indonesia. Artinya pengeluaran pemerintah yang rendah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Indonesia harus melakukan penekanan belanja, melaksanakan program-program, proyek yang ditujukan untuk kepentingan rakyat harus dijalankan dengan kesadaran dan tepat sasaran. Kemudian penyesuaian ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan cara membangun sektor keuangan,

mengkolaborasi sumber daya manusia dan sumber daya alam, dan melakukan intervensi dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Lalu perubahan sistem administrasi perpajakan ke arah yang lebih modern dengan menggunakan media elektronik yaitu aplikasi e-filling untuk pelaporan pajak, perubahan tata kerja dengan memperbanyak petugas-petugas yang memberikan pelayanan kepada pembayar pajak, mulai dari konter layanan sampai dengan petugas pajak yang ditunjuk untuk memberikan bimbingan dan konsultasi kepada setiap pembayar pajak.

### 4.3 Korelasi Antar Variabel

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18 for windows* diperoleh koefisien korelasi antara ketiga variabel tersebut sebagai berikut:

**Tabel 4.6**
**Korelasi Antar Variabel Penelitian**

**Correlations**

| | | Pengeluaran Pemerintah | Pertumbuhan Ekonomi | Penerimaan Pajak |
|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran Pemerintah | Pearson Correlation | 1 | .946** | .925** |
| | Sig. (1-tailed) | | .000 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 |
| Pertumbuhan Ekonomi | Pearson Correlation | .946** | 1 | .881** |
| | Sig. (1-tailed) | .000 | | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 |
| Penerimaan Pajak | Pearson Correlation | .925** | .881** | 1 |
| | Sig. (1-tailed) | .000 | .000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 |

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Koefisien korelasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan output dari pengolahan data menggunakan software *SPSS 18 for windows* diperoleh nilai koefisien korelasi antara pengeluaran pemerintah

dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,946. Tingkat keeratan korelasi berada pada interval 0,81-1,00 yang termasuk kategori tinggi. Artinya hubungan korelasi antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi adalah tinggi. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi searah, artinya jika pengeluaran pemerintah berkurang maka pertumbuhan ekonomi akan bertambah. Adapun tingkat signifikasinya adalah 0,000 yang artinya pengaruh tersebut signifikan karena < 0,05. Kesimpulannya adalah korelasi antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi adalah tinggi dan signifikan. Artinya perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada pengeluaran konsumsi terutama pada konsumsi pemerintah. Setelah masa krisis ekonomi terlihat bahwa konsumsi merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Siti Farida, 2011:75).

b. Berdasarkan output dari pengolahan data menggunakan software *SPSS 18 for windows* diperoleh nilai koefisien korelasi antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak sebesar 0,925. Tingkat keeratan korelasi berada pada interval 0,81-1,00 yang termasuk kategori tinggi. Artinya hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak adalah tinggi. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak searah, artinya jika pengeluran pemerintah berkurang maka penerimaan pajak meningkat. Adapun tingkat signifikasinya adalah 0,000 yang artinya pengaruh tersebut signifikan karena < 0,05. Kesimpulannya adalah korelasi antara pengeluaran pemerintah dengan

penerimaan pajak adalah tinggi dan signifikan. Artinya pengeluaran pemerintah meningkatkan penerimaan pemerintah (Narayan, 2005:148). Adapun salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah pajak yang diramalkan. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan (Sadono Sukirno, 2004:186).

c. Berdasarkan output dari pengolahan data menggunakan software *SPSS 18 for windows* diperoleh nilai koefisien korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah sebesar 0,881. Tingkat keeratan korelasi berada pada interval 0,81-1,00 yang termasuk kategori tinggi. Artinya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak adalah tinggi. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak searah, artinya jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka penerimaan pajak akan tinggi pula. Adapun tingkat signifikasinya adalah 0,000 yang artinya pengaruh tersebut signifikan karena < 0,05. Kesimpulannya adalah korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak sangat tinggi dan signifikan. Artinya terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak (Herman, 2007:7).

### 4.3.1 Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Pertama

Pada sub struktur yang pertama variabel pengeluaran pemerintah berperan sebagai variabel independen (*eksogenus variable*) dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen (*endogenus variable*). Selanjutnya untuk menguji

pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

**1. Koefisien Jalur**

Karena variabel independen hanya satu variabel (pengeluaran pemerintah), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18 for windows* diperoleh koefisien jalur pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

**Tabel 4.7**
**Koefisien Jalur Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -272480.664 | 101674.156 | | -2.680 | .012 |
| | Pengeluaran Pemerintah | 14.246 | .924 | .946 | 15.422 | .000 |

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,946 pada tabel 4.7 merupakan nilai koefisien jalur pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Disimpulkan bahwa fungsi belanja pemerintah menghubungkan belanja pemerintah dan tingkat pendapatan dalam perekonomian (Sigit Triandaru, 2000:183). Artinya, meningkatnya pengeluaran pemerintah berfungsi untuk meningkatkan pendapatan dalam perekonomian negara.

**2. Koefisien Determinasi**

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS 18 *for Windows* diperoleh koefisien determinasi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

**Tabel 4.8**
**Koefisien determinasi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

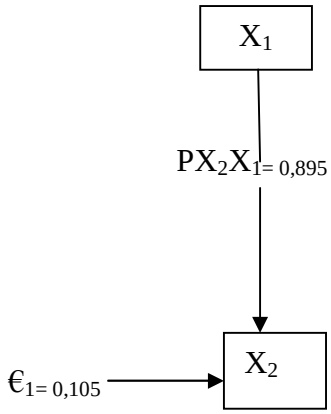
**Model Summary[b]**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .946[a] | .895 | .891 | 1.52979E5 |

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel penyebab terhadap variabel akibat. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh sebesar 89,5% terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara sisanya sebesar 10,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar yaitu antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, seperti konsumsi masyarakat (Dornbusch, 1957:246), investasi (Mudrajad Kuncoro, 2004).




**Gambar 4.3**
**Koefisien Jalur Sub-Struktur Pertama**

Berdasarkan gambar diatas dapat dibuat bentuk persamaan jalur sebagai berikut:

$$\mathbf{X_2 = P_{X2X1} X_1 + \varepsilon_1}$$

### 4.3.2 Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Kedua

Pada sub struktur yang kedua, variabel pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen *(eksogenus variable)* dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen *(endogenus variable*).

**1. Koefisen Jalur**

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software SPSS 18 for Windows* diperoleh koefisien jalur pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak sebagai berikut :

**Tabel 4.9**
**Koefisien Jalur Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -440061.414 | 53701.181 | | -8.195 | .000 |
| | Pengeluaran Pemerintah | 5.254 | 1.341 | .879 | 3.918 | .001 |
| | Pertumbuhan Ekonomi | .019 | .089 | .049 | .218 | .829 |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,879 dan 0,049 pada tabel 4.9 merupakan nilai koefisien jalur Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak.

**2. Koefisien Determinasi**

Melalui koefisien jalur yang telah diperoleh, selanjutnya dihitung koefisien determinasi, yaitu besar kontribusi/pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software SPSS 18 for Windows* diperoleh koefisien determinasi pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak sebagai berikut :

**Tabel 4.10**
**Koefisien Determinasi Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak**

**Model Summary[b]**

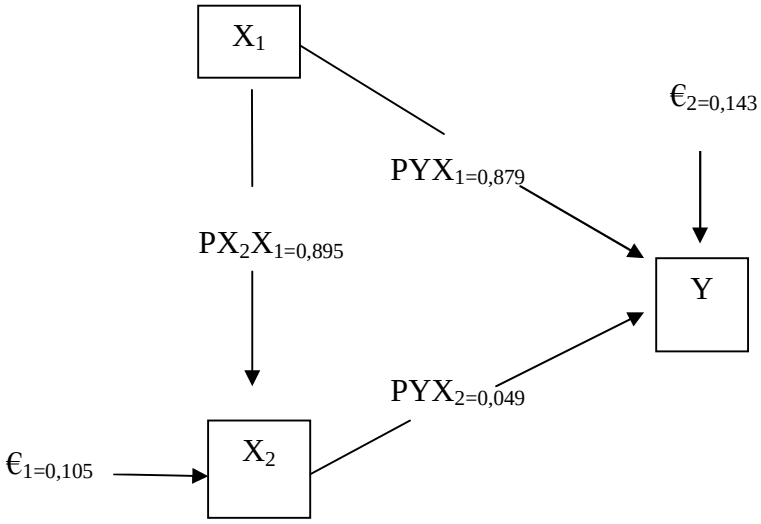
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .926[a] | .857 | .846 | 72081.4818 |

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Melalui nilai koefisien determinasi (R *Square*) dapat diketahui bahwa secara bersama-sama pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 85,7% terhadap penerimaan pajak. Sedangkan sisanya sebesar 14,3% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel yang sedang diteliti, seperti konsumsi masyarakat (Dornbusch, 1957:246), investasi (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Secara visual jalur dari variabel independen terhadap penerimaan pajak dapat dilihat pada gambar berikut:




**Gambar 4.4**
**Koefisien Jalur Sub-Struktur Kedua**

Melalui koefisien jalur tersebut selanjutnya dihitung besar pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen sebagai berikut:

Besar pengaruh pengeluaran pemerintah ($X_1$) terhadap penerimaan pajak (Y) di Indonesia.

Pengaruh variabel $X_1$ terhadap variabel Y :

Pengaruh $X_1$ terhadap Y secara langsung = (0,879) × (0,879) = 0,772

Pengaruh tidak langsung $X_1$ terhadap Y = (0,879) × (0,946) × 0,049 = 0,038 +

Pengaruh Total = **0,810**

Maka total yang memberikan pengaruh pengeluaran pemerintah ($X_1$) terhadap penerimaan pajak (Y) adalah sebesar 81% dengan arah positif. Artinya jumlah pengeluaran pemerintah yang semakin menurun cenderung akan meningkatkan penerimaan pajak.

Besar pengaruh pertumbuhan ekonomi ($X_2$) terhadap penerimaan pajak (Y) yaitu :

Pengaruh variabel $X_2$ terhadap variabel Y :

Pengaruh $X_2$ terhadap Y secara langsung = 0,049 × 0,049 = 0,002

Pengaruh tidak langsung $X_2$ terhadap Y = 0,049 × (0,946) × (0,879) = 0,038 +

Pengaruh Total = **0,040**

Maka total yang memberikan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak adalah sebesar **4%** dengan arah positif. Artinya jumlah pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat cenderung akan meningkatkan pula penerimaan pajak.

### 4.4 Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan apakah pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara bersama-sama maupun secara parsial, maka dilakukan pengujian hipotesis.

**1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Secara Simultan**

Selanjutnya untuk menguji apakah pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, maka dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat melalui tabel ANOVA hasil pengolahan *software SPSS 18 for windows*.

Tahapan-tahapan pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut :

a) Merumuskan hipotesis statistik

$H_0$ : $\rho_{YX1X2} = 0$ Menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

$H_i$ : $\rho_{YX1X2} \neq 0$ Menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

b) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0{,}05$ atau 5 % dengan derajat bebas (k;n-k-1) df=2:27. Pada tabel F untuk $df_1=2$, $df_2=27$ diperoleh nilai $F_{tabel}$ sebesar 3,354.

c) Mencari nilai $F_{hitung}$

Dengan bantuan *software SPSS 18 for windows*, diperoleh *output* untuk mendapatkan nilai dari $F_{hitung}$ sebagai berikut :

**Tabel 4.11**
**ANOVA Untuk Uji Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak**

**ANOVA[b]**

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 839.200.000.000.000 | 2 | 419.600.000.000.000 | 80.755 | .000[a] |
| | Residual | 140.300.000.000.000 | 27 | 5.196.000.000.000 | | |
| | Total | 979.400.000.000.000 | 29 | | | |

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Pada tabel diatas, diperoleh nilai $F_{hitung}$ sebesar 80,755.

d) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan $F_{hitung}$ terhadap $F_{tabel}$ dengan ketentuan sebagai berikut:

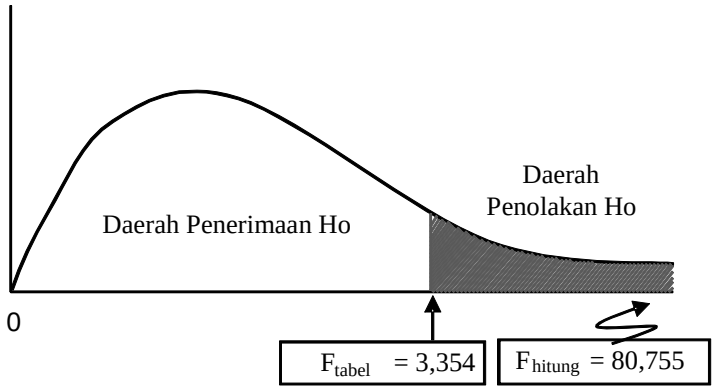
Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka $H_0$ ditolak (signifikan)

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka $H_0$ diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan $F_{hitung}$ terhadap $F_{tabel}$ adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ (80,755 > 3,354), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan menolak $H_0$ dan menerima $H_i$ yang berarti kedua variabel bebas, yaitu pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Selain itu peneliti juga melakukan pengujian dengan cara melihat nilai signifikansi yang dapat dilihat pada tabel 4.11.

Dari tabel ANOVA diatas diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansi adalah $H_0$ ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan $H_0$ sebagai berikut :




**Gambar 4.5**
**Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji F**
**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak**

e) Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.7 diatas dapat dilihat bahwa $H_0$ ditolak, karena $F_{hitung}$ sebesar 80,755 berada pada daerah penolakan $H_0$, sehingga disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

f) Kesimpulan

Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Guritno (1993) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang berkurang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak.

## 2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Secara Parsial

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 1,703 yang diperoleh dari tabel t pada α = 0,05 dan derajat bebas 27 untuk pengujian satu pihak. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial untuk variabel pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.12**
**Uji t Untuk Variabel Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -272480.664 | 101674.156 | | -2.680 | .012 |
| | Pengeluaran Pemerintah | 14.246 | .924 | .946 | 15.422 | .000 |

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sedangkan untuk pengujian secara parsial untuk variabel pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.13**
**Uji t Untuk Variabel Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -440061.414 | 53701.181 | | -8.195 | .000 |
| | Pengeluaran Pemerintah | 5.254 | 1.341 | .879 | 3.918 | .001 |
| | Pertumbuhan Ekonomi | .019 | .089 | .049 | .218 | .829 |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Nilai statistik uji t yang terdapat pada tabel 4.12 dan 4.13 selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai $t_{tabel}$ untuk menentukan apakah variabel yang sedang diuji berpengaruh signifikan atau tidak.

## A. Pengujian Hipotesis Pengeluaran Pemerintah Secara Parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Untuk membuktikan apakah pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Merumuskan hipotesis statistik

$H_0$ : $\rho_{X1X2} = 0$ Menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_i$ : $\rho_{X1X2} \neq 0$ Menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

b) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0{,}05$ atau 5 % dengan derajat bebas (df= n-k-1) df= 30-2-1= 27, dimana nilai $t_{tabel}$ pengujian satu arah sebesar 1,703.

c) Mencari nilai $t_{hitung}$

Melalui keluaran *software SPSS 18 for windows* seperti terlihat pada tabel 4.12 diperoleh nilai $t_{hitung}$ untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar 15,441.

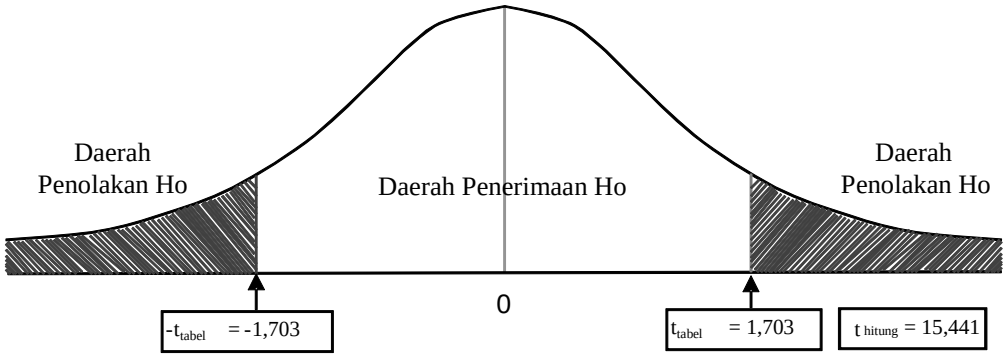
d) Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan $t_{hitung}$ terhadap $t_{tabel}$ dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$,maka $H_0$ ditolak (tidak berpengaruh positif)

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka $H_0$ diterima (berpengaruh positif)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan $t_{hitung}$ dengan $t_{tabel}$ adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (15,441>1,703), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak $H_0$ sehingga $H_i$ diterima. Artinya Pengeluaran Pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan $H_0$ sebagai berikut :




**Gambar 4.6**
**Daerah Penerimaan dan Penolakan $H_0$ Pada Uji t**
**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

e) Pengambilan keputusan hipotesis

Pada gambar 4.8 diatas dapat dilihat bahwa $H_0$ ditolak, karena $t_{hitung}$ sebesar 15,441 berada pada daerah penolakan $H_0$, yang berarti bahwa Pengeluaran Pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

f) Kesimpulan

Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Marta (2006) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**B. Pengujian Hipotesis Pengeluaran Pemerintah Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak**

Dihipotesiskan bahwa pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk membuktikan dugaan tersebut dilakukan pengujian secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Merumuskan hipotesis statistik

$H_0$ : $\rho_{YX1} = 0$ Menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

$H_i$ : $\rho_{YX1} \neq 0$ Menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

b) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0{,}05$ atau 5 % dengan derajat bebas (df = n-k-1) df=30-2-1=27, dimana nilai $t_{tabel}$ pengujian satu arah sebesar 1,703.

c) Mencari nilai $t_{hitung}$

**Tabel 4.14**
**Uji t Untuk Variabel Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

**Coefficients[a]**

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | -440061.414 | 53701.181 | | -8.195 | .000 |
| Pengeluaran Pemerintah | 5.254 | 1.341 | .879 | **3.918** | .001 |
| Pertumbuhan Ekonomi | .019 | .089 | .049 | .218 | .829 |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Melalui keluaran *software SPSS 18 for windows* seperti terlihat pada tabel 4.14 diperoleh nilai $t_{hitung}$ untuk variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar 3,918.

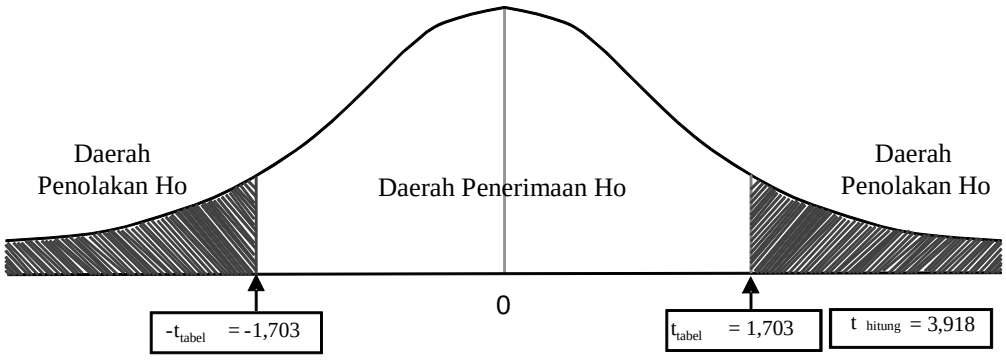
d) Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan $t_{hitung}$ terhadap $t_{tabel}$ dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$,maka $H_0$ ditolak (tidak berpengaruh positif)

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka $H_0$ diterima (berpengaruh positif)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan $t_{hitung}$ dengan $t_{tabel}$ adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,918>1,703), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak $H_0$ sehingga $H_i$ diterima. Artinya pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan $H_0$ sebagai berikut:




**Gambar 4.7**
**Daerah Penerimaan dan Penolakan $H_0$ Pada Uji t**
**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penerimaan Pajak**

e) Pengambilan keputusan hipotesis

Pada gambar 4.10 diatas dapat dilihat bahwa $H_0$ ditolak, karena $t_{hitung}$ sebesar 3,918 berada pada daerah penolakan $H_0$, yang berarti bahwa

Pengeluaran Pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

f) Kesimpulan

Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abu N.M Wahid (2008) yang mengatakan bahwa turunnya pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak.

## C. Pengujian Hipotesis Pertumbuhan Ekonomi Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak

Dihipotesiskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, untuk membuktikan dugaan tersebut dilakukan pengujian secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Merumuskan hipotesis statistik

$H_0$ : $\rho_{YX2} = 0$ Menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

$H_i$ : $\rho_{YX2} \neq 0$ Menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

b) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0{,}05$ atau 5 % dengan derajat bebas (df= n-k-1) df= 30-2-1= 27, dimana nilai $t_{tabel}$ pengujian satu arah sebesar 1,703.

c) Mencari nilai $t_{hitung}$

**Tabel 4.15**
**Uji t Untuk Variabel Pertumbuhan Ekonomi**
**Terhadap Penerimaan Pajak**

**Coefficients[a]**

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1(Constant) | -440061.414 | 53701.181 | | -8.195 | .000 |
| Pengeluaran Pemerintah | 5.254 | 1.341 | .879 | 3.918 | .001 |
| Pertumbuhan Ekonomi | .019 | .089 | .049 | **.218** | .829 |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Melalui keluaran *software SPSS 18 for windows* seperti terlihat pada tabel 4.14 diperoleh nilai $t_{hitung}$ untuk variabel $X_2$ sebesar 0,218.

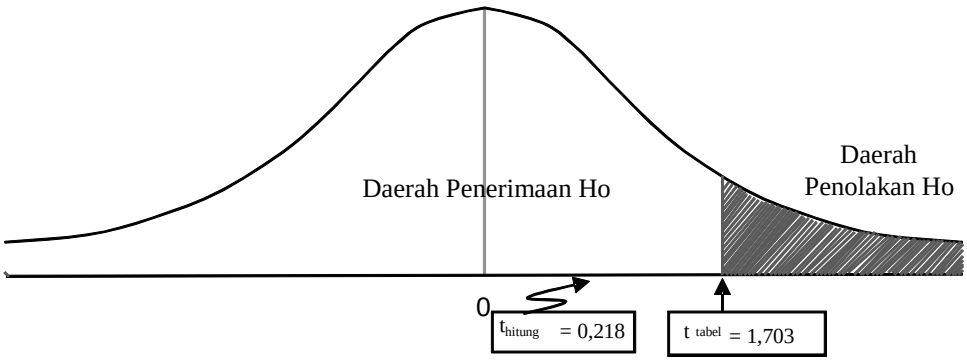
d) Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan $t_{hitung}$ terhadap $t_{tabel}$ dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$,maka $H_0$ ditolak (berpengaruh positif)

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka $H_0$ diterima (tidak berpengaruh positif)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan $t_{hitung}$ dengan $t_{tabel}$ adalah $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,218 < 1,703), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima $H_0$ sehingga $H_i$ ditolak. Artinya pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan $H_0$ sebagai berikut :




**Gambar 4.8**
**Daerah Penerimaan dan Penolakan $H_0$ Pada Uji t**
**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak**

e) Pengambilan keputusan hipotesis

Pada gambar 4.11 diatas dapat dilihat bahwa $H_0$ ditolak, karena $t_{hitung}$ sebesar 0,218 berada pada daerah penerimaan $H_0$, yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

f) Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Alasannya karena keterbatasan penelitian pada data sekunder yang digunakan.